

STRATEGI PENTAHELIX DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP) (STUDI KASUS DI KODIM 1807/SORONG SELATAN)

*The Pentahelix Strategy in Military Operations Other Than War (MOOTW):
A Case Study of the 1807th Military District Command (Kodim 1807) South Sorong*

Moch. Zaenal Wafa¹, Thomas Gabriel J², Robby Moechammad Taufik³

¹²³ Universitas Pertahanan Republik Indonesia

email penulis koresponden¹ jostgebi@gmail.com², email penulis koresponden³

Abstract. Territorial defense is a fundamental aspect of the national defense system that emphasizes the involvement of all components of the nation. In West Papua Province, particularly in Sorong Selatan Regency, the dynamics of socio-political conditions and conflict vulnerability make the area highly exposed to non-military threats such as separatism, horizontal conflict, and radicalism. Kodim 1807/Sorong Selatan, as a territorial unit of the Indonesian Army, plays a strategic role in implementing Military Operations Other Than War (MOOTW) to maintain regional stability. This study aims to analyze the territorial defense strategy of Kodim 1807/Sorong Selatan in addressing non-military threats and its contribution to community resilience. The research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with military personnel, local government officials, traditional leaders, religious figures, and analysis of official documents. The findings indicate that the Kodim's strategy is focused on territorial development, strengthening area resilience, and conducting civic-military operations. Social communication programs effectively reinforced social cohesion, while civic actions had a tangible impact on community welfare and enhanced the legitimacy of the military. Despite limited resources and challenges in cross-sector coordination, the strategy has proven effective in reducing potential conflicts and enhancing social resilience. This study highlights that synergy among the military, local government, traditional authorities, religious leaders, and civil society is the key factor in the success of territorial defense strategies in conflict-prone regions.

Keywords: Territorial defense, MOOTW, Kodim 1807/Sorong Selatan, social conflict, non-military threats

Abstrak. Ketahanan teritorial merupakan aspek fundamental dalam sistem pertahanan negara yang menekankan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Sorong Selatan, dinamika sosial politik dan kerawanan konflik menjadikan daerah ini rentan terhadap ancaman nonmiliter seperti separatisme, konflik horizontal, dan radikalisme. Kodim 1807/Sorong Selatan sebagai satuan teritorial TNI AD memegang peranan strategis dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk menjaga stabilitas wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pertahanan teritorial Kodim 1807/Sorong Selatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter serta kontribusinya terhadap ketahanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Kodim difokuskan pada pembinaan teritorial, penguatan ketahanan wilayah, dan pelaksanaan operasi bhakti TNI. Program komunikasi sosial dengan masyarakat berhasil memperkuat kohesi sosial, sementara operasi bhakti memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan legitimasi TNI di mata masyarakat. Kendati terdapat keterbatasan sumber daya dan tantangan koordinasi lintas sektor, strategi ini terbukti efektif dalam mereduksi potensi konflik serta meningkatkan resiliensi sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, agama, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan strategi pertahanan teritorial di wilayah rawan konflik.

Kata Kunci: Pertahanan teritorial, OMSP, Kodim 1807/Sorong Selatan, konflik sosial, ancaman nonmiliter

1. LATAR BELAKANG

Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang menekankan keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara. Sistem ini menuntut keterpaduan antara kekuatan utama (TNI), kekuatan cadangan, dan kekuatan pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman. Namun, dinamika ancaman kontemporer tidak hanya bersumber dari aspek militer, melainkan juga ancaman nonmiliter yang kompleks seperti separatisme, radikalisme, konflik horizontal, serta disintegrasi sosial. Ancaman nonmiliter ini bahkan seringkali lebih sulit ditangani karena berakar pada persoalan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga keamanan (IPOLEKSOSBUD-HANKAM). Kondisi ini menegaskan bahwa pertahanan nasional tidak bisa hanya berorientasi pada kekuatan tempur, melainkan juga pada penguatan aspek teritorial dan sosial.

Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Sorong Selatan, merupakan salah satu wilayah dengan dinamika keamanan yang tinggi. Selain memiliki posisi strategis di wilayah perbatasan laut dan daratan, daerah ini juga kerap menghadapi potensi konflik sosial akibat keragaman etnis, agama, serta kesenjangan pembangunan. Selain itu, aktivitas kelompok separatistis di Papua turut menciptakan situasi yang rawan dan penuh tantangan. BPS (2024) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Sorong Selatan mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, yang memperkuat potensi timbulnya ketidakpuasan sosial. Faktor-faktor tersebut menjadikan Sorong Selatan sebagai kawasan yang sangat relevan untuk diteliti dalam konteks strategi pertahanan teritorial.

Kodim 1807/Sorong Selatan sebagai satuan teritorial TNI AD memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas daerah. Melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Kodim berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga agen pembangunan dan perekat sosial. Strategi

pertahanan teritorial yang dijalankan diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kesadaran bela negara, serta membangun resiliensi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui program pembinaan teritorial, komunikasi sosial, operasi bhakti, hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, Kodim tidak hanya berperan sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai pilar yang mendukung integrasi nasional di tengah keragaman dan kompleksitas ancaman.

Pentahelix merupakan model strategis kolaboratif yang melibatkan lima unsur utama dalam penanganan konflik dan pembangunan daerah, yaitu pemerintah, masyarakat, militer (atau lembaga negara), komunitas internasional, dan sektor swasta. Model ini dikembangkan sebagai penyempurnaan dari model *Counterinsurgency (COIN)* konvensional seperti *Mystic Diamond Model* milik Gordon McCormick yang hanya mencakup empat unsur: negara, masyarakat, aktor non-negara, dan komunitas internasional (Halkis,2020)

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana strategi Kodim 1807/Sorong Selatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah rawan konflik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori pertahanan, sekaligus kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan pertahanan negara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi pertahanan teritorial, sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi bagi TNI dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan kontekstual dengan tantangan di lapangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep ketahanan nasional menjadi landasan teoretis dalam memahami peran pertahanan teritorial. Menurut Salim (2020), ketahanan nasional mencerminkan kemampuan bangsa untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang bersifat militer maupun nonmiliter. Dalam konteks Sishankamrata, TNI sebagai komponen utama pertahanan memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem pertahanan yang menyeluruh dan terpadu. OMSP yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan wujud implementasi peran ini, terutama dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang berdampak langsung pada stabilitas nasional.

Kajian sebelumnya menegaskan pentingnya ketahanan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Effendi (2021) menjelaskan bahwa ketahanan sosial dibangun melalui kohesi sosial, solidaritas, dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi konflik horizontal maupun ancaman ideologis. Sejalan dengan itu, Syahputra (2023) menyoroti efektivitas peran TNI dalam mencegah konflik sosial berbasis komunitas melalui pendekatan humanis, dialog lintas budaya, serta pembinaan teritorial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kekuatan TNI bukan hanya pada aspek militer, melainkan juga kemampuan membangun kepercayaan dan legitimasi di tengah masyarakat.

Selain itu, teori multikulturalisme menjadi kerangka yang relevan dalam konteks Papua Barat Daya yang memiliki keberagaman etnis, agama, dan budaya. Multikulturalisme menekankan pada penerimaan perbedaan serta pengelolaan keragaman untuk menciptakan harmoni sosial (Parekh, 2000). Dalam penelitian Rahman dan Yusuf (2022), implementasi OMSP di kawasan timur Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama mampu memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian, strategi

pertahanan teritorial harus berlandaskan pendekatan yang inklusif, humanis, dan adaptif terhadap realitas sosial setempat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah Kodim 1807/Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Informan penelitian meliputi aparat TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan triangulasi sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kodim 1807/Sorong Selatan memposisikan dirinya sebagai aktor utama dalam mengimplementasikan OMSP di wilayah yang rawan konflik. Kodim melaksanakan tiga bentuk strategi utama, yaitu: pembinaan teritorial (Binter), komunikasi sosial, dan operasi bhakti TNI. Melalui pembinaan teritorial, TNI hadir di tengah masyarakat dengan membangun kedekatan dan rasa kepercayaan. Komunikasi sosial dilaksanakan untuk membangun kohesi sosial dan mencegah potensi konflik horizontal, sedangkan operasi bhakti TNI diwujudkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan desa, renovasi rumah ibadah, dan pelayanan kesehatan. Upaya ini memperlihatkan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan dan perekat sosial.

Efektivitas strategi Kodim terbukti dalam memperkuat kohesi sosial di wilayah Sorong Selatan. Masyarakat yang terdiri dari beragam etnis dan agama merespons positif pendekatan TNI yang humanis dan inklusif. Strategi

ini selaras dengan teori multikulturalisme (Parekh, 2000) yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap keragaman sebagai modal sosial. Program komunikasi sosial, seperti forum diskusi lintas agama, terbukti menurunkan potensi konflik dan meningkatkan rasa saling percaya. Hal ini menguatkan temuan Syahputra (2023) bahwa kehadiran TNI dalam membangun dialog lintas komunitas dapat meredam eskalasi konflik.

Meski strategi berjalan efektif, terdapat kendala yang signifikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta tantangan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan lembaga lain. Hal ini menyebabkan sebagian program Kodim belum optimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif teori ketahanan nasional (Salim, 2020), keterbatasan ini menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan harus bersifat holistik dan membutuhkan dukungan dari semua komponen bangsa, bukan hanya TNI semata. Oleh karena itu, peran kolaborasi menjadi kunci penting.

Secara keseluruhan, strategi pertahanan teritorial Kodim 1807/Sorong Selatan memberikan kontribusi nyata terhadap resiliensi masyarakat dan stabilitas wilayah. Program OMSP yang dilaksanakan terbukti menekan potensi konflik sosial, meningkatkan kesadaran bela negara, serta memperkuat legitimasi TNI di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep ketahanan sosial (Effendi, 2021), di mana kehadiran TNI memperkuat solidaritas dan kohesi masyarakat dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Dengan demikian, meski terdapat berbagai keterbatasan, strategi Kodim dapat dianggap sebagai model implementasi OMSP yang adaptif, humanis, dan kontekstual dengan realitas sosial di Papua Barat Daya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi pertahanan teritorial Kodim 1807/Sorong Selatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter terbukti memiliki

peran penting dalam memperkuat stabilitas wilayah dan resiliensi masyarakat. Strategi yang dijalankan melalui pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta operasi bhakti TNI berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta mereduksi potensi konflik di wilayah multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam konteks daerah rawan konflik.

Selain itu, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya dan tantangan koordinasi lintas sektor, kontribusi Kodim terhadap ketahanan sosial dan legitimasi negara di tingkat lokal tidak dapat diabaikan. Dengan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil, strategi pertahanan teritorial tidak hanya menjadi instrumen keamanan, tetapi juga instrumen pembangunan dan integrasi nasional. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa ketahanan nasional sejatinya dibangun dari ketahanan sosial di tingkat komunitas.

Selain itu adanya saran terkait penguatan sinergi antar instansi, peningkatan kapasitas sumber daya, pendekatan multikultural yang Inklusif, penguatan peran tokoh local, serta pengembangan kajian akademik diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji perbandingan implementasi strategi pertahanan teritorial di berbagai wilayah Papua, untuk memperoleh model terbaik dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Effendi, T. (2021). *Ketahanan Sosial Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Salim, A. (2020). *Ketahanan Nasional: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan, I. B. (2016). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana.

2. Jurnal

- Mhd Halkis, 2020, The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua, *Journal Society*, Vol 8 No 1 (2020) , Published June 30, 2020, DOI :<https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182>
- Rahman, A., & Yusuf, H. (2022). Implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(2), 45–63. <https://doi.org/10.22146/jpbn.2022.12.2.45>
- Syahputra, F. (2023). Peran TNI dalam Mencegah Konflik Sosial Berbasis Komunitas: Studi Kasus Sumatera. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 101–120. <https://doi.org/10.22146/jkn.2023.29.1.101>
- Yani, Y. M. (2018). The Role of Indonesian Territorial Army in Maintaining National Resilience. *Indonesian Journal of Defense Studies*, 4(1), 55–72.
- Widjanto, A. (2020). Territorial Defense Strategy in Facing Non-Military Threats. *Defence and Security Journal*, 7(2), 99–115.
- Kurniawan, B. (2019). Multiculturalism and National Integration in Papua. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(3), 230–242.

3. Media Online

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sorong Selatan. Diakses dari <https://www.bps.go.id>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). Data dan Informasi Komponen Cadangan. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara.

Portal Resmi TNI Angkatan Darat. (2023). Kodim 1807/Sorong Selatan dalam Menjaga Stabilitas Wilayah. Diakses dari <https://triad.mil.id>

Tempo.co. (2023, Oktober 12). Konflik Sosial di Papua Barat Daya dan Peran TNI. Diakses dari <https://www.tempo.co>